



## **Dari Bantuan Menuju Kemandirian: Analisis Penerapan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya**

Achmad Hidayah Silmy<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sosiologi

E-mail: [hihidayahsilmy@gmail.com](mailto:hihidayahsilmy@gmail.com)

### **Abstract**

*The Disability-Friendly Social Assistance Program (ASPD) implemented by the Surabaya City Social Services Agency is a social policy strategy created to address social welfare issues that prioritize persons with disabilities. The assistance program is not solely focused on providing material assistance, but rather embraces a transformative approach, such as fostering independence for persons with disabilities, aimed at increasing accessibility to basic services and meeting basic living needs, with the aim of ensuring long-term functionality. Although the ASPD program substantially has a positive impact and significant long-term benefits, the reality on the ground still faces various structural and technical obstacles, including limited community preparedness, requirements for distribution mechanisms, and weak cross-sectoral coordination. This study uses a qualitative approach with descriptive methods to in-depth analyze the implementation process, its impact on persons with disabilities, and the challenges faced in implementing the ASPD program in Surabaya. The findings of this study are expected to contribute to strengthening more inclusive, effective, and empowerment-oriented social policies, in order to realize sustainable social welfare and justice for persons with disabilities.*

**Keywords:** *welfare, persons with disabilities, social.*

### **Abstrak**

*Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan salah satu strategi kebijakan sosial yang diciptakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diutamakan bagi penyandang disabilitas. Program bantuan yang di berikan tidak semata-mata terfokus pada penyampaian materi, namun lebih mengutamakan pada pendekatan secara transformatif seperti menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar, dan memenuhi kebutuhan hidup yang di upayakan dapat berfungsi dalam skala jangka panjang. Meskipun secara substansial program ASPD memberikan dampak positif dan manfaat signifikan dalam jangka panjang, kenyataan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, antara lain keterbatasan kesiapan masyarakat, persyaratan mekanisme distribusi, serta lemahnya koordinasi antar lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara mendalam proses pelaksanaan, dampak yang ditimbulkan pada penyandang disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan program ASPD di Kota Surabaya. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan sosial yang lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada pemberdayaan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.*

**Kata Kunci:** *kesejahteraan, penyandang disabilitas, sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai kota terpadat nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya harus siap menghadapi beberapa masalah dalam memberikan layanan dan kesejahteraan yang terbaik bagi warganya, dengan Jumlah penduduk yang terus bertambah, tingkat urbanisasi yang tinggi, serta pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan tugas sendiri bagi pemerintah kota dalam memberikan beberapa terobosan dalam menghadapi beberapa masalah di dalamnya salah satu yang sedang terjadi dan di bahas dalam karya ilmiah ini adalah pada kesejahteraan sosial dan masalah kesehatan pada masyarakat kota Surabaya, salah satu contoh masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah Kota Surabaya adalah semakin meningkatnya penyandang disabilitas setiap tahun nya, seperti yang di ungkapkan oleh kasi Dinas Sosial Surabaya pada sebuah media Suara Surabaya “Dinas Sosial Kota Surabaya mengungkapkan data terbaru jika jumlah penyandang disabilitas di Kota Surabaya selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Di tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mencapai 9.852 orang (Rosaa, 2021).

Berdasarkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas di Indonesia juga telah diatur Undang undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pihak pemerintah kota surabaya mendukung penuh beberapa program untuk memberikan kesejahteraan secara merata bagi warganya salah satunya adalah memberikan wewenang kepada dinas sosial untuk mengadakan salah satu program seperti Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) merupakan proses pelaksanaan bantuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 29 angka (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial, yang dimaksud pada penganggaran bantuan sosial pada APBD Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas serta, fungsi dalam menjalankan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan bencana serta pelayanan dasar. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui menginisiasi program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk melakukan upaya menyediakan hak kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan sosial non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk penyandang disabilitas berat di luar panti

untuk membiayai kebutuhan peningkatan dalam meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten atau kota. hingga tingkat terendah seperti RT, RW dan Kelurahan hingga masyarakat dalam proses pendukung program ini hampir seluruh lembaga saling terkait

Disabilitas sendiri istilah yang diberikan pada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal pada umumnya, terutama terletak pada kemampuan fisik. Disabilitas dan difabel, dalam kajian ilmu sosial secara umum merupakan sebutan yang merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Setiap orang dilahirkan berbeda dan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, Sebagian besar difabel memiliki kecenderungan yang “eksklusif” ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam artian mengasingkan dirinya dalam proses interaksi masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirinya karena kecenderungan ini menjadikan difabel minim akses informasi dan komunikasi. Selain itu difabel dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara, (2) kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, tunalaras dan autisme, dan (3) kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan urusan pemerintahan bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan perda yang sudah di sebutkan maka dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial mengenai bantuan bantuan yang di berikan, Dinas sosial sendiri mendirikan UPT sebagai penanggung jawab pada program ASPD, salah satu UPT yang menaungi pada program ini adalah UPT Rehabilitas sosial yang bertugas pada masalah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial yang cukup beragam dan membutuhkan penanganan tepat sasaran menjadi kunci penanganan permasalahan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan baik dan diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya. Maka dari itu manajemen tepat sasaran dan juga cara mengatasi hal tersebut (Jazuli et al., 2023). Dengan permasalahan seperti itu sangat di

butuhkan beberapa pihak tertentu untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menanalisis penerapan program asistensi sosial penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Asistensi Sosial**

Kepedulian sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memberikan semangat kembali dan menciptakan kemandirian meminimalisir kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Asistensi sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk meringankan beban hidup individu yang sedang mengalami beberapa masalah sosial, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang tercukupi, mulai dari kaum lanjut usia, terlantar, odgj, dan penyandang disabilitas.

Konsep utama dari asistensi sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2018 mEngeai perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2011 mengenai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 29 angka (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial (Ichwan & Pradana, 2022). adalah memberikan bantuan yang bertujuan untuk memenuhi:

1. Kebutuhan dasar yang esensial dimana kebutuhan dasar manusia salah satu unsur unsur yang di butuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologi. konsep ini sangat di utamakan tanpa beberapa unsur di atas manusia akan merasa kurang dalam menjalani kehidupannya kebutuhan fisiologis yang di maksud adalah dimana kebutuhan yang bersifat mutlak bagi setiap manusia, kebutuhan tersebut meliputi seperti oksigen, air, makanan, gas, cairan dan sejenisnya, tak dapat di pungkiri saat saat salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang akan tidak berjalan semestinya. Yang ke 2 adalah kebutuhan psikologis kebutuhan ini meliputi rasa cinta, kepedulian antar sesama manusia dan kasih sayang, dimana setiap individu yang ada pada suatu masyarakat membutuhkan rasa kepedulian, terutama pada konsep asistensi sosial, dimana kita berada pada lingkup sosial, kepedulian antar sesama menjadi tiang penting dalam menciptakan kondisi sosial yang baik, Keterikatan emosional dengan orang lain dimana Rasa cinta akan memberikan dukungan emosional dan rasa memiliki, yang membantu mengurangi rasa kesepian. Kemudian Interaksi

sosial dan saling peduli antar individu yang akan menciptakan suasana ikatan komunitas yang kuat dalam sistem sosial di suatu lingkup masyarakat. Dan memberikan rasa nyaman disaat beberapa individu yang memiliki keterbatasan tertentu merasa di terima di masyarakat dan dihargai, serta mengurangi risiko isolasi social

2. Pendampingan Sosial pada proses ini yang dimana bertujuan pada beberapa individu yang mengalami keterbatasan tertentu, mempunyai peran penting dalam menjalankan sistem sosial yang baik, pada proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa beberapa layanan yang di tujukan untuk individu yang memiliki keterbatasan tertentu tercukupi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan, selain itu pendampingan sosial menjadi jembatan antara individu dengan layanan yang tersedia. Dengan adanya pendampingan, kebutuhan dasar penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara nyata dan terorganisir, yang berkontribusi banyak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup mereka.

### **Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, pemberdayaan adalah gabungan dari konsep kekuasaan, kekuasaan dan pemberdayaan sejatinya adalah 2 konsep yang tidak bisa terpisahkan. Dimana kekuasaan bersifat mempengaruhi kepada siapapun, seperti konsep kekuasaan menurut faucalt bahwa “setiap orang mempunyai wewenang untuk memimpin atau mempunyai kuasa dalam artian untuk memengaruhi individu yang lain”, dalam konsep pemberdayaan kekuasaan berperan penting dalam mengatur individu yang lain untuk menganut sebuah sistem, pengaruh dan kontrol yang sudah tertata, Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial (Mujtahid et al., 2025).

Pada konsep ini tidak akan terjadi perubahan tanpa konsep kekuasaan di dalamnya, dengan kekuasaan yang bersifat bisa mengubah apa yang sudah terjalankan, pemberdayaan bisa akan di laksanakan karena tujuan utama dalam konsep pemberdayaan adalah dengan adanya perubahan. Pemberdayaan dalam sistem sosial merujuk pada perubahan positif dalam suatu masalah yang ada di masyarakat, seperti masalah pada masyarakat usia lanjut, penyandang disabilitas, penderita odgj yang dimana butuh bimbingan lebih dari beberapa pihak terkait untuk menuju kesejahteraan sosial yang adil (Syobah, 2018). Pemberdayaan terfokus pada peningkatan kemandirian bagi kelompok tertentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi pengembangan keterampilan mereka dalam masyarakat dan

pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola kehidupan mereka secara mandiri untuk menghindari dari masalah isolasi sosial.

### **Konsep Difabel Dan Inklusi Sosial**

Konsep difabel dan inklusi sosial saling terkait, di mana inklusi sosial berfungsi sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa penyandang difabel dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Dengan menghapus hambatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggotanya (Puspita & Astuti, 2021).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan serta dampak program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) di Kota Surabaya. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengalaman penerima manfaat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam program. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh bersifat deskriptif dan interpretatif sehingga mampu menggambarkan realitas sosial sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat (Lexy J Moleong, 2019).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Sosial, pendamping sosial, penerima manfaat, serta pihak lain yang terkait, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan. Sementara itu, observasi dilakukan secara langsung di lapangan guna memperkuat temuan dari wawancara sekaligus memahami kondisi nyata yang terjadi. Melalui kombinasi kedua teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya**

Dalam melaksanakan suatu program yang sedang di jalankan, tidak bisa terlepas dari beberapa pendalaman pendekatan untuk mensukseskan suatu program yang sedang berjalan. Pendekatan inklusif dalam sebuah program sangatlah berperan dalam desain kesuksesan berjalannya program tersebut. Pendekatan inklusif didasarkan pada prinsip fundamental bahwa setiap masyarakat, termasuk anak-anak, warga, penyandang difabel, berhak

mendapatkan kesempatan yang setara untuk menerima perlakuan setara di mata semua orang dan lingkungan kehidupan (Ki et al., 2021). setiap masyarakat berhak menerima perlakuan yang sama di semua mata orang, pendekatan inklusif dalam pelaksanaan program berperan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, inklusif sendiri mempunyai arti keterlibatan aktif semua kelompok dalam sebuah kegiatan. Pemberian bantuan sendiri bertujuan memperhatikan prinsip rehabilitasi sosial dalam upaya mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat, mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dengan memperkuat fungsi keluarga.

Seperti pada program yang sedang di giat oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menanggulangi masalah kesejahteraan difabel ini, Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) memberikan keterbukaan ruang pada semua kalangan untuk turut andil dalam melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini semua kalangan berperan dan mempunyai andil dalam kesuksesan program ini, salah satunya adalah peran masyarakat, Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan mengenai kekurangan program, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan (Riyanto & Kovalenko, 2023), selain masyarakat penyandang difabel sendiri juga turut berperan sebagai subjek tidak hanya menjadi sekedar objek bantuan. Dimana dengan pendekatan ini akan memudahkan mengenai kepastian bahwa seluruh penyandang difabel menerima manfaat dari program ini tanpa memandang tingkat kedisabilitasnya.

Dengan peran pasrtipasi masyakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik dan pembanguna (Riyanto & Kovalenko, 2023) ,sehingga dapat lebih merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Bantuan bagi para peyandang disabilitas dapat diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan mereka sehari-hari yang mencakup sandang, pangan, air bersih, dan keperluan keseharian, agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar (Andari, 2016). Mengingat rata rata penyandang difabel tergolong sebagai masyarakat yang secara tidak langsung kurang bisa hidup seperti manusia normal pada umum nya, dengan pendekatan inklusif ini di harapkan para penyandang difabel dapat hidup layaknya manusia pada umumnya tanpa tertinggal dengan masyarakat lainnya.

Peran perangkat masyarakat juga tidak kalah penting dalam proses mensukseskan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, dimana dalam proses penyaluran bantuan kebutuhan bagi difabel perlu beberapa tahap di dalamnya, seperti peran TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), perangkat desa, RW, hingga RT saling berhubungan satu sama lain. Sehingga, dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan melaksanakan rapat koordinasi, memberikan sosialisasi serta forum sehingga dapat tersalurkan dengan maksimal ke penerima manfaat dan peruntukannya (St Nur Rahmah, 2024). Seperti yang terjadi di Dinas Sosial Kota Surabaya, proses dalam pemberian tidak bisa secara langsung, tahap pertama dalam proses ini seperti yang saya temui semasa proses magang saya di Dinas Sosial Kota Surabaya adalah pelaporan dari pihak RT/RW mengenai keberadaan individu yang menyandang disabilitas atau yang sedang membutuhkan bantuan sosial, kemudian dari laporan tersebut pihak desa mengirimkan surat kepada pihak TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dari proses tersebut setelah surat sampai hingga pihak Dinas Sosial, dari situ pihak dinas sosial akan melakukan pengecekan dari beberapa data yang sudah di berikan oleh pihak desa untuk kepantasan individu tersebut layak menerima bantuan tersebut atau tidak.

Dengan pendekatan inklusif, berperan banyak dalam pensuskesan program dari Dinas Sosial, dengan peran peran banyak kalangan akan membantu pada proses dimana bantuan dapat tertuju pada inidvidu yang memang membutuhkan dan tidak salah sasaran ataupun di salah gunakan untuk kepentingan pribadi, karena Dinas Sosial sendiri tidak bisa berdiri sendiri dalam mensejahterakan masyarakat, pilar-pilar sosial tersebut tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan banyaknya jumlah penerima manfaat sehingga diperlukan adanya keterlibatan dengan pihak lainnya yang meliputi aparatatur perangkat desa, kelurahan, RT dan RW setempat.

Dalam proses program ini penyandang difabel sendiri juga berturut andil dalam beberpa hal di dalamnya. Penyandang difabel tidak hanya berperan sebagai objek penerima saja tapi juga sebagai subjek dalam beberapa hal lainnya, Program ini tidak hanya memposisikan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaannya. Pendekatan inklusif akan lebih bermakna jika difabel diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan turut mengawasi pelaksanaan program, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Peran difabel dalam program ini bisa terjadi pada proses:

1. Partisipasi Aktif Dalam Perencanaan Program

Penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program melalui peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Mereka berkontribusi dalam menyampaikan kebutuhan spesifik dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil. Penyandang disabilitas sendiri adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan keterbatasan tersebut tidak semua penyandang difabel dapat menyerap informasi mengenai program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk melengkapinya, maka dari itu penyandang difabel juga mempunyai peran melalui penyebaran informasi antar sesama difabel sehingga kesejahteraan seluruh penyandang difabel dapat terpenuhi dan dapat sedikit membantu mengenai bagaimana strategi selanjutnya yang lebih tepat untuk melaksanakan program-program tersebut (Nurkholis et al., 2023).

## 2. Pemberdayaan Dan Kemandirian

Pemberdayaan melalui Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) menjadi langkah penting untuk mengubah paradigma bahwa penyandang disabilitas hanya sebagai objek bantuan. Ketika mereka difasilitasi untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, kepercayaan diri meningkat dan potensi mereka lebih mudah berkembang. Inilah wujud nyata dari keadilan sosial: memberi alat, bukan sekadar memberi belas kasihan. Tapi bagaimana mereka mampu menghadapi kondisi yang mana kondisi tersebut bisa menjadikan disabilitas untuk hidup mandiri demi mencapai masa depan yang lebih baik (Imansyah & Muhid, 2022). Kondisi disabilitas yang mampu dan percaya diri dalam mencapai kehidupan yang mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

## 3. Agen edukasi dan advokasi

Peran penyandang disabilitas sebagai agen edukasi sangat strategis, karena mereka menyampaikan informasi dari pengalaman langsung yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh sesama. Ini membangun solidaritas, meningkatkan kesadaran hak, dan memutus stigma di masyarakat. Ketika difabel berbicara untuk dirinya dan komunitasnya, suara mereka menjadi kekuatan perubahan sosial. Seperti penyandang disabilitas dapat mandiri dan bertanggung jawab serta mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam melewati masa-masa selama adaptasinya. Dari edukasi tersebut juga dapat memberikan bagaimana peran orang terdekat dalam mendukung selama masa adaptasi tersebut seperti bagaimana peran keluarga dan orang-orang terdekat dalam mendukung, sehingga keberhasilan disabilitas juga tidak terpisah dari orang-orang terdekat dan keluarga.

### **Keterbatasan Struktural Dan Tantangan Keberlanjutan Program**

Meskipun program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) ini sudah berjalan cukup lama dan sudah melibatkan berbagai pihak di dalam prosesnya, tapi pada kenyataan yang di lapangan program ini menjalani berbagai rintangan entah itu bagi pihak penyelenggara program seperti Dinas Sosial dan pihak pihak terkait di dalamnya, dan juga terjadi pada pihak penyandang difabel sendiri sebagai objek bantuan.

Sejatinya penyandang difabel juga mempunyai hak yang sama dalam menjalani kehidupan sehari hari layaknya manusia pada umumnya, maka dari itu sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam bidang kesejahteraan sosial Dinas Sosial mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya, dari berbagai tantangan yang akan di jabarkan di bawah pihak Dinas Sosial mempunyai beberapa juga jalan keluar nya agar program ini selalu menjadi kepuasan bagi para penyandang difabel. Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Sholihah, 2016).

Masalah yang paling utama dan sering di hadapi pada usaha kesuksesan program Asistensi Sosial Penyandang Difabel(ASPD) adalah keterbatasan struktural, keterbatasan yang di maksud adalah dimana sistem , organisasi, dan tata kelola yang masih tergolong belum cukup rapi.dimana sistem pada pihak terkait yang tergolong masih membingungkan, mengingat tidak semua orang dapat mengakses beberapa informasi mengenai bagaimana proses bantuan itu dapat turun pada pihak yang membutuhkan, masalah ini bisa terjadi ketika sikap masyarakat yang kurang terbuka pada pihak penyandang difabel, masih banyak asumsi masyarakat yang memamndang bahwa penyandang difabel tidak sama dengan manusia normal. Yang juga berimbas pada Kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun telah ada peraturan pemerintah yang mengatur rasio penerimaan orang dengan disabilitas di perusahaan tetap dialami oleh orang dengan disabilitas (Apsari & Raharjo, 2021). Dengan diskriminasi seperti hal di atas perbaikan sistem informasi mengenai tata cara harus lebih di perhatikan lagi, seperti contoh penanggulangan mengenai sistem salah satunya adalah lebih banyak menggandeng para penyandang difabel dalam pelaksanaan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Dimana para penyandang difabel akan bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai bagaimana cara untuk menerima bantuan entah itu dari edukasi ataupun dari beberapa forum yang tersedia.

Selain itu tata kelola seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi masalah utama, mengingat penyandang difabel di Surabaya juga tidak sedikit seperti pada data yang kami peroleh dari situs web <https://opendata.surabaya.go.id/> pada data tersebut di paparkan dengan jelas jumlah difabel dari setiap kecamatan di seluruh Surabaya

**Tabel 1.** Jumlah Penyandang Disabilitas Dari Tahun 2021-2024

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS</b>
2021	7785 Orang
2022	6797 Orang
2023	4302 Orang
2024	1920 Orang

Dari total penyandang Difabel yang tergolong tidak sedikit, tenaga yang di butuhkan guna mensejahterakan kebutuhan kebutuhan bagi para difabel tidak sedikit, tapi masalah ini yang menjadi tantangan tersendiri, dari hasil pengamatan selama masa magang di Dinas Sosial menganggap bahwa tenaga kerja yang di berikan oleh pihak pemerintah sangatlah minim, beberapa pihak di dalamnya merasa dengan kekurangan ini menjadikan program tidak bisa berjalan secara lancar dan mulus, dengan permintaan bantuan yang terus meningkatkan setiap harinya membuat beberapa pihak tenaga kerja merasa kesulitan, terutama pada beberapa daerah terpencil dan terpelosok yang notabennya lebih membutuhkan karena akses terhadap layanan kesehatan sangatlah minim.

Dengan adanya masalah tersebut pihak Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program ini harus secara tanggap mengatasi masalah ini, dari hasil yang saya lihat banyak kerugian dan komentar negatif dari masyarakat atas masalah ini, seperti saja saat pada proses pengantaran bantuan mengalami keterlambatan dapat berpengaruh pada penyandang difabel mengenai kondisi kesehatan yang semakin memburuk, maka dari itu kerjasama dengan beberapa pihak mengenai masalah ini sangatlah perlu, mulai dari pihak pemerintah hingga pihak swasta dan masyarakat. Dan Pembagian kerja yang lebih terstruktur: seperti administrasi perkantoran lebih merujuk kepada pembagian kerja yang terstruktur untuk efisiensi dan efektivitas dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat di lakukan sesuai tepat sasaran (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Dengan kesulitan pada tenaga kerja yang kurang juga berpengaruh pada Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Diperbarui Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial perlu diperbarui secara terus-menerus melalui pelaporan ke DTKS. Hal ini bertujuan untuk

menghindari penerimaan bantuan sosial oleh mereka yang sebenarnya mampu, Selain itu, penting juga untuk mencatat masyarakat yang telah pindah ke daerah lain atau telah meninggal dunia agar bantuan sosial dapat diberikan dengan akurat. Bagi masyarakat yang merupakan penerima bantuan sosial dan pindah domisili, mereka diharuskan melapor kepada pemerintah setempat agar bantuan sosial yang seharusnya mereka terima dapat diberikan sesuai dengan alamat baru mereka, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan bantuan sosial yang sesuai. (Suprianik et al., 2024)

### **Keefektivitasan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Dinas Sosial Kota Surabaya**

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan bentuk konkret dari upaya menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) ini telah memberikan dampak yang besar bagi pada penyandang difabel di Kota Surabaya, manfaat dari program ini telah menjadikan semangat baru bagi para penyandang difabel di beberapa wilayah Kota Surabaya. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan langkah positif dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Efektivitas program ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang sudah terjadi di masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, bantuan kebutuhan hidup sehari-hari, serta dukungan psikososial dan pelatihan keterampilan. Dengan adanya program ini, penyandang disabilitas tidak hanya dibantu secara ekonomi, tetapi juga diberdayakan agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa ASPD telah memberikan manfaat langsung bagi sebagian besar penerima manfaat, terutama dalam menyediakan kebutuhan dasar dan peningkatan kepercayaan diri. Namun demikian, efektivitas program ini belum merata dan masih menghadapi tantangan- tantangan di dalamnya, seperti masalah keterbatasan struktural dan kurangnya pendekatan secara inklusif rendahnya kapasitas pendamping SDM, serta minimnya pelibatan aktif komunitas penyandang disabilitas dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Karena masih banyak nya masyarakat yang juga berspekulasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas, Stigma (kutukan, nasib), dan sebagainya (iprahantika)

Lebih jauh lagi, program yang diinginkan ini memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan semua pihak di masyarakat, lembaga kesehatan, dunia usaha, dan organisasi

penyandang disabilitas untuk memperluas cakupan serta memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi. Tanpa transformasi struktural dan peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), program ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek tanpa berdampak sistemik.

Oleh karena itu, ASPD sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan, pembangunan merupakan proses strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan keberlanjutan kemajuan suatu daerah atau negara, Pelaksanaan program pembangunan harus didasarkan pada visi jangka panjang yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan dalam pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam kasus program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), misalnya, pembangunan mencerminkan upaya memberikan dorongan lebih bagi para penyandang difabel dan meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan akses yang lebih terbuka bagi para penyandang difabel, serta memberikan hak yang sama seperti manusia pada umumnya, pembangunan dalam pelaksanaan program adalah menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial secara luas (Jannah, 2013).

## **KESIMPULAN**

Program ASPD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan akses layanan dasar, kebutuhan hidup, serta pemberdayaan psikososial dan keterampilan penyandang disabilitas. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilannya dalam menjangkau dan memberdayakan masyarakat rentan ini. Namun, keberhasilan program ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta kesiapan masyarakat dan tenaga kerja dalam mengelola program secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas jangka 2 system2 dari program ini memerlukan 6 upaya perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan agar 2 system yang dibangun dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata.

## SARAN

Perbaiki Data dan Informasi dimana Dinas Sosial perlu secara rutin memperbarui data penerima bantuan melalui sistem pelaporan yang terintegrasi, sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan efisien. Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama Memperkuat koordinasi lintas sistem, termasuk dengan sistem swasta dan komunitas sistem untuk mendukung keberlanjutan program dan meningkatkan capaian target. Pelatihan dan Penguatan SDM seperti Memberikan pelatihan yang memadai bagi tenaga kerja dan pendamping sosial agar mampu mengelola program dengan sistem diagonal dan mampu menghadapi berbagai tantangan lapangan. Pengembangan Sistem Digitalisasi, Mengimplementasikan sistem berbasis teknologi seperti aplikasi atau portal data digital (misalnya E-Disabilitas) untuk memudahkan proses data, verifikasi, dan pelaporan secara real-time. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program, agar mereka turut terlibat aktif dalam proses pemberdayaan dan pengawasan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2016). *Soetji Andari*. 49–60.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Ichwan, M. K., & Pradana, G. W. (2022). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli (Swp) Baskara Di Desa Gebyog Oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan. *Publika*, 3(2), 208–2015. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44627>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 1, 2 1,2. *10*(13), 588–593.
- Imansyah, M. R., & Muhid, A. (2022). Upaya meningkatkan kemandirian pada penyandang disabilitas melalui pelatihan kemandirian adl (activity of daily living). *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 75–83.
- Jannah, F. (2013). *Pe Ndidikan Islam Dalam Siste M Pe Ndidikan Nasional*. 13(2), 161–173.
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Ki, I., Dewantara, H., Konsep, T., Nasional, P., & Rahmah, A. A. (2021). Scidac Plus.

*Berkala Ilmiah Pendidikan, 1(2).*

Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik, 2(4)*, 103–108. <https://sihojournal.com/index.php/identik/article/view/667>

Nurkholis, Pramono, S., & Pramudiana, I. D. (2023). Impelementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Nurkholis, Sapto Pramono, Ika Devy Pramudiana SAP – Edisi Khusus Tema Kebijakan Tahun 2023. *SAP - Edisi Khusus Tema Kebijakan, 525–534*.

Puspita, D. D., & Astuti, E. Z. L. (2021). Praktik baik pemberdayaan difabel oleh kelompok difabel Desa Makmur Jati Mandiri. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 22(2)*, 1–9. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v22i2.1087>

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2)*, 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>

Rosaa, M. (2021). *Jumlah Penyandang Disabilitas di Surabaya Meningkat*. Suaraturabaya.Com. <https://www.suaraturabaya.net/kelanakota/2021/jumlah-penyandang-disabilitas-di-surabaya-meningkat/>

Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa, 2(2)*, 166–184. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>

St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, M. I. (2024). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan. 12(Idm)*, 27–38.

Suprianik, Safitri, D. N., Wulandari, T., & Arasati, T. L. (2024). Tantangan dan Peluang Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, 951–952., 3(4), 5–24.

Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 15(2)*, 29–38. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057>